

BAB XII

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

A. KEBUTUHAN DANA INVESTASI PEMBANGUNAN

Untuk mengimplementasikan seluruh program pembangunan di Propinsi DKI Jakarta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Propeda Propinsi DKI Jakarta 2002-2007, diperlukan dukungan dana dan kontribusi dari semua pihak. Mengingat dana memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan, maka kebutuhannya perlu diperkirakan secara cermat. Selanjutnya perkiraan kebutuhan dana sangat diperlukan untuk menyusun strategi dalam menghimpun maupun mengalokasikannya dana pembangunan baik untuk pembangunan tahunan maupun pembangunan selama lima tahun, dari 2003-2007.

1. Metode Menghitung Perkiraan Kebutuhan Investasi

Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) atau rasio kenaikan ouput akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan. ICOR secara konsep dirumuskan

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

dimana

ICOR = *Incremental Capital Ouput Ratio*, adalah besarnya penambahan kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output satu unit

ΔK = perubahan nilai kapital atau nilai investasi

ΔY = perubahan nilai output

Sebagai ilustrasi, arti dari angka ICOR sebesar 3.0 adalah agar output perekonomian naik satu rupiah dibutuhkan tambahan kapital senilai 3.0 rupiah. Perhitungan angka ICOR biasanya bukan dari perubahan kapital dan output tahun per tahun, melainkan dihitung dalam selang waktu yang relatif panjang,

misalnya 5 tahun. Sebab penambahan kapital pada tahun ini tidak otomatis diikuti oleh penambahan output pada tahun ini juga, melainkan baru akan muncul pada satu atau dua tahun yang akan datang. Selain itu masa yang dibutuhkan dari waktu penambahan kapital sampai dengan menghasilkan output akan berbeda-beda dari sektor yang satu dengan sektor lainnya. Sebagai contoh penambahan kapital (investasi) pada sektor bangunan akan mendatangkan output paling cepat pada 2–3 tahun yang akan datang. Di sisi lain penambahan kapital (investasi) untuk kegiatan perdagangan, dipastikan akan mendatangkan output dalam jangka waktu kurang dari satu tahun setelah investasi.

Angka ICOR bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya, hal ini bergantung pada tingkat efisiensi ekonomi suatu negara. Semakin tinggi angka ICOR, semakin tidak efisien kegiatan produksi di negara tersebut, demikian sebaliknya. Indonesia pada beberapa waktu yang lalu pernah memiliki angka ICOR 4.5. Pada periode yang sama negara-negara maju di dunia umumnya memiliki angka ICOR tidak lebih dari 3.0. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi dari kegiatan produksi di Indonesia jauh di bawah negara-negara maju.

Dalam prakteknya penerapan formula ICOR seperti dicantumkan di atas mengalami kesulitan, terutama dalam menaksir tingkat output. Untuk itu kemudian nilai output diganti oleh nilai Produk Domestik Bruto, sehingga konsep praktis perhitungan ICOR diformulasikan menjadi,

$$ICOR = \frac{I}{\Delta PDB}$$

dimana

I = nilai investasi ($= \Delta K$)

ΔPDB = perubahan nilai PDB (Produk Domestik Bruto)

Kemudian mengingat ICOR harus dihitung dalam selang waktu yang relatif lama, maka berikut adalah formulasi ICOR yang dihitung dari tahun m hingga n

$$ICOR_{m \rightarrow n} = \frac{\sum_{i=m}^n I_{i-1}}{PDRB_n - PDRB_m}$$

dimana

m = tahun mulai perhitungan ICOR

n = tahun akhir perhitungan ICOR

$PDRB_m$ = Angka PDRB pada awal perhitungan ICOR

$PDRB_n$ = Angka PDRB pada tahun terakhir perhitungan ICOR

Berdasarkan formula di atas maka makna ICOR sedikit berubah menjadi berapa rupiah investasi yang dibutuhkan pada tahun t untuk menambah satu rupiah PDRB pada tahun t+1. Setelah diperoleh angka ICOR berdasarkan rumus di atas, kemudian dihitung kebutuhan investasi menggunakan rumus teknis sebagai berikut

$$I_t = ICOR(PDRB_{t+1} - PDRB_t)$$

Makna yang terkandung dalam formula tersebut adalah agar PDRB pada tahun t+1 bertambah menjadi sebesar $PDRB_{t+1}$ dari nilai tahun t sebesar $PDRB_t$ maka pada tahun t harus dilakukan investasi sebesar I_t . Formula lebih sederhana yang diturunkan dari persamaan di atas adalah

$$I_t = ICOR * (LPE_{(t+1)} / 100) * PDRB_t$$

dimana

I_t = nilai investasi yang dibutuhkan tahun t

$PDRB_t$ = nilai PDRB tahun t

ICOR = angka ICOR

$LPE_{(t+1)}$ = angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) yang ditargetkan pada tahun t+1

2. Perkembangan Angka ICOR Perekonomian Propinsi DKI Jakarta

Berdasarkan formula yang dibicarakan pada bagian sebelumnya, maka angka ICOR pada masing-masing periode dihitung, dan hasilnya disajikan pada Tabel 12.1.

Tabel 12.1.
Angka ICOR Propinsi DKI Jakarta pada Berbagai Periode

| PERIODE | 1986-97 | 1987-97 | 1988-97 | 1989-97 | 1990-97 | 1991-97 | 1992-97 | 1993-97 | 1994-97 | 1997-00 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ICOR | 5.55 | 5.53 | 5.49 | 5.71 | 5.71 | 5.65 | 5.63 | 5.85 | 6.29 | 5.90 |

Dari Tabel 12.1 tampak angka-angka ICOR DKI selalu lebih besar daripada 5.25, sementara ICOR nasional berkisar pada angka 4.5-5.0. Jika tidak berpikir panjang, kita akan menganggap bahwa tingkat efisiensi perekonomian DKI di bawah tingkat efisiensi nasional. Namun jika dipikir lebih jauh, bahwa dampak investasi di DKI bukan hanya menciptakan output di DKI saja, melainkan memunculkan output-output dan PDRB baru di berbagai propinsi. Hal ini dimungkinkan karena adanya saling keterkaitan ekonomi antara daerah yang satu dengan lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, kegiatan investasi di luar DKI pun akan berpengaruh terhadap penciptaan output di DKI. Diperkirakan dampak bersih dari kegiatan investasi di Jakarta dan Luar Jakarta bernilai negatif terhadap output Jakarta. Sebagai penjelasan, misalnya di Provinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta masing-masing berinvestasi sebesar satu juta rupiah, maka penambahan output di Jakarta lebih kecil daripada di Jawa Barat. Jadi Propinsi DKI Jakarta lebih kuat mendorong penciptaan output di Jawa Barat, ketimbang Jawa Barat mendorong penciptaan output di Jakarta.

Ditambah lagi bahwa ICOR tersebut bukan dihitung berdasarkan penambahan nilai output, melainkan penambahan nilai PDRB. Oleh karena penambahan PDRB lebih kecil daripada penambahan outputnya, maka sangat masuk akal jika angka ICOR hasil perhitungan lebih besar daripada angka ICOR nasional.

Terlepas dari alasan angka ICOR Jakarta yang lebih tinggi dari tingkat nasional, bagaimanapun juga untuk memperkirakan kebutuhan investasi agar pertumbuhan output atau PDRB Jakarta sesuai dengan yang diharapkan

warganya, maka angka ICOR yang digunakan haruslah ICOR Propinsi DKI Jakarta.

Agar lebih akurat, maka ICOR yang disarankan untuk digunakan adalah yang dihitung dari suatu periode yang relatif panjang. Oleh karenanya dianjurkan ICOR yang dipakai adalah antara 4.50-5.50.

3. Perkiraan Kebutuhan Investasi Propinsi DKI Jakarta

Untuk memperkirakan kebutuhan investasi pada beberapa periode ke depan, seperti sudah dijelaskan di atas, akan digunakan angka ICOR yang mendekati angka Propinsi DKI Jakarta, yaitu bergerak dari 5.50 ke 4.50 yang berarti mengarah pada investasi yang lebih efisien.

Dengan menggunakan angka-angka ICOR itu dan dengan menggunakan proyeksi laju pertumbuhan PDRB tahunan seperti yang telah dibahas pada Bab 2, maka kebutuhan investasi dalam harga berlaku disajikan pada Tabel 12.2.

Tabel 12.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Propinsi DKI Jakarta 2003-2007

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | PDRB Harga Konstan 93 (triliun Rp) | PDRB Harga Berlaku (triliun Rp) | ICOR | Perkiraan Kebutuhan Investasi (triliun Rp) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| 2003 | 4.62 | 67.36 | 291.72 | 5.00 | 64.31 |
| 2004 | 5.16 | 70.84 | 349.30 | 4.80 | 82.34 |
| 2005 | 5.20 | 74.52 | 418.12 | 4.70 | 97.06 |
| 2006 | 5.48 | 78.61 | 502.41 | 4.50 | 117.68 |
| 2007 | 5.96 | 83.29 | 612.48 | 4.50 | 154.90 |
| 2003-2007 | - | - | - | - | 516.29 |
| Rata-Rata Per Tahun | 5.28 | - | - | 4.70 | 103.26 |

Jika menggunakan angka ICOR antara 4.5-5.5 atau rata-rata 4.70, maka kebutuhan investasi pada periode 2003-2007 diperkirakan mencapai Rp 516.29 triliun, sehingga kebutuhan investasi per tahun kira-kira senilai Rp 103.26 triliun.

B. INVESTASI PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

Dana investasi sebesar Rp 516.29 triliun untuk periode 2003-2007, dapat bersumber dari pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat, dunia usaha maupun masyarakat. Sumber dana investasi itu tidak terbatas dari sumber pendanaan dalam negeri yang biasanya dari tabungan domestik maupun pinjaman domestik, tetapi tidak tertutup kemungkinan sumber dana pinjaman luar negeri. Bahkan dapat saja dana investasi berasal dari daerah lain, yang memandang Jakarta bernilai strategis dan memiliki keunggulan komparatif dibanding daerah-daerah lainnya.

Untuk memperkirakan dana investasi yang dikeluarkan pemerintah Propinsi DKI Jakarta perlu ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui APBD yang dapat dikategorikan sebagai investasi adalah pengeluaran untuk modal pembangunan dan biaya rehabilitasi sarana dan prasarana publik.
- b. Kelompok pengeluaran demikian diperkirakan persinya mencapai 59.98 % dari total APBD Propinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2003. Angka tersebut tersusun atas 33% untuk modal pembangunan dan sisanya untuk biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi. Porsi tersebut akan dipertahankan hingga tahun 2007.
- c. Angka APBD Propinsi DKI Jakarta.
- d. Laju pertumbuhan angka APBD diperkirakan 10.37, 9.30, 15.16, 13.47 dan 14.93 persen masing-masing untuk tahun anggaran 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007.

Dengan batasan-batasan tersebut maka pengeluaran investasi pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam periode 2003-2007 akan mencapai nilai Rp 39.75 triliun. Angka perkiraan pengeluaran investasi pemerintah Propinsi DKI Jakarta dicantumkan pada Tabel 12.3.

Tabel 12.3.
Perkiraan Dana Investasi Berasal dari Pemerintah DKI

| Tahun | Pertumbuhan APBD (%) | APBD DKI (triliun Rp) | Alokasi Pengeluaran Pembangunan (%) | Pengeluaran Pembangunan (milyar Rp) |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 2002 | | 9.35 | 59.98 | 5.05 |
| 2003 | 10.37 | 10.32 | 59.98 | 5.57 |
| 2004 | 9.30 | 11.28 | 59.98 | 6.41 |
| 2005 | 15.16 | 12.99 | 59.98 | 7.34 |
| 2006 | 13.47 | 14.74 | 59.98 | 8.37 |
| 2007 | 14.93 | 16.94 | 59.98 | 9.50 |
| Jumlah/ Rata-Rata | 12.65 | - | 59.98 | 39.75 |

Berdasarkan angka investasi tersebut, maka peran investasi pemerintah daerah pada tahun 2003 mencapai 9.63 persen (lihat Tabel 12.4). Kemudian perannya akan semakin berkurang masing-masing menjadi 8.22 persen dan 8.03 persen untuk tahun 2004 dan 2005, selanjutnya menurun lagi menjadi 7.51 persen dan 6.56 persen untuk tahun 2006 dan 2007. Sementara itu, peranan pihak lain (Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat) dalam investasi meningkat dari 90.37 persen tahun 2003 menjadi 93.44 persen tahun 2007. Peranan Pemda Propinsi DKI Jakarta yang masih tinggi pada tahun 2003, lebih disebabkan karena dunia usaha belum pulih benar kemampuannya akibat krisis berkepanjangan.

Dengan kontribusi investasi yang kecil, pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta seyogyanya tidak berharap terlalu tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibangkitkan oleh pengeluaran pembangunan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan, lebih banyak diperankan oleh masyarakat dan dunia usaha. Peran pemerintah kembali pada tugas pokoknya yaitu sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Tabel 12.4.
Peran Pemerintah DKI dalam Investasi Daerah

| Tahun | Total Investasi di DKI 2003-2007 (triliun Rp) | Investasi Pemda Propinsi DKI Jakarta (triliun Rp) | Kontribusi Pemda Propinsi DKI Jakarta Dalam Investasi (%) | Kontribusi Pihak Lain (%) |
|--------------|--|--|--|----------------------------------|
| 2003 | 64.31 | 6.19 | 9.63 | 90.37 |
| 2004 | 82.34 | 6.77 | 8.22 | 91.78 |
| 2005 | 97.06 | 7.79 | 8.03 | 91.97 |
| 2006 | 117.68 | 8.84 | 7.51 | 92.49 |
| 2007 | 154.90 | 10.16 | 6.56 | 93.44 |
| Rata-Rata | 103.26 | 7.95 | 7.99 | 92.01 |